
SITUASI DAN GAMBARAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PETA FSVA DAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN

Yeni Budiawati¹, Ronnie S Natawidjaja²

¹*Program Studi Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran*

²*Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran*

Email: yenibudiawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Banten dengan membandingkan ketahanan pangan berdasarkan peta FSVA Provinsi Banten (2018) yang menggunakan 9 indikator dengan penelitian Deby Eryani Setiawan et al (2017) yang menggunakan 6 indikator, kemudian juga dibandingkan dengan data- data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peta FSVA Provinsi Banten berada dalam kondisi tahan pangan (Prioritas 5), namun jika dilihat dari masing-masing indikator masih terdapat beberapa daerah atau rumah tangga yang masih rentan. Urutan 9 indikator paling rawan tahan di Provinsi Banten adalah persentase balita stunting, persentase balita gizi buruk, rata-rata lama sekolah anak perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa gizi akses air bersih, proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, harapan hidup, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, dan indikator terbaik adalah rasio penduduk per tenaga kesehatan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten menunjukkan bahwa Kota Serang memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Banten dan termasuk dalam kategori daerah rawan pangan kategori rendah.

Kata kunci: Peta FSVA, Indikator, Indeks Ketahanan Pangan, Aspek Kerentanan Transient Food Insecurit

ABSTRACT

This study aims to describe the situation and condition of food security in Banten Province by comparing food security based on the FSVA map of Banten Province (2018) which uses 9 indicators with research by Deby Eryani Setiawan et al (2017) which uses 6 indicators, then also compared with data- associated secondary data. The results show that even though the FSVA map Banten Province is in a food-resistant condition (Priority 5), if viewed from each indicator, there are still some areas or households that are still vulnerable. The order of 9 indicators from the most vulnerable to resistant in Banten Province is the percentage of stunted children under five, the percentage of malnourished children under 15 years of age, the average length of school for girls over 15 years, the percentage of households without access to clean water, the proportion of expenditure on food to total expenditure, life expectancy, percentage of households without access to electricity, percentage of population below the poverty line, and the best indicator is the ratio of population per health worker. Based on the Food Security Index for each

Regency / City in Banten Province, it shows that Serang City has the lowest Food Security Index (IKP) value compared to other districts / cities in Banten Province and is in the low category of food insecure areas.

Keywords: FSVA map, indicator, food security index, aspects of vulnerability to transient food insecurity

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan tentang pengertian ketahanan pangan, yaitu terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi ketahanan pangan menurut Undang-undang tersebut sudah selangkah lebih maju, karena mendefinisikan ketahanan pangan tidak sebatas pada level rumah tangga, akan tetapi pada individu. Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, ditunjukkan antara lain dengan dijadikannya isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus kebijaksanaan operasional

pembangunan pertanian dalam Kabinet Persatuan Nasional (1999-2004) di samping fokus lainnya (Handewi PS Rahman, dkk, 2002).

Dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah, menurut Suryana, (2003) harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Terpenuhinya pangan yang cukup diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas bukan hanya beras tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda zat lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari kaidah agama.

3. Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang merata, dapat diartikan pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. Artinya dalam hal ini masyarakat memiliki akses dalam memperoleh pangan.
4. Terpenuhiya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh oleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Provinsi Banten memiliki karakteristik yang strategis, karena sebagian wilayahnya merupakan daerah penyangga ibukota dan juga merupakan pintu masuk dan keluar ke wilayah Sumatera. Sebagai wilayah, Banten terhitung kecil dan masih berusia muda. Namun, dengan adanya Era desentralisasi yang dimulai sejak tahun 1999 dan terbitnya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004. Adanya perubahan kebijakan dari sentralistik menjadi desentralistik ini menjadi harapan baru untuk mengubah kondisi sosial ekonomi dan

politik masyarakat ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ketahanan pangan di daerah baik dalam tingkat wilayah maupun rumah tangga sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Hal ini menjadi penting karena dengan ketahanan pangan yang kuat maka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat tercapai sehingga akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) tahun 2018 provinsi Banten masuk dalam kategori prioritas 5 yang artinya wilayah Provinsi Banten masuk dalam kategori tahan pangan. Artinya sebagian besar wilayah di Provinsi Banten termasuk dalam kategori tahan pangan. Akan tetapi, hasil penelitian Tanziha (2005) menyebutkan sekitar 9.3% masih ada penduduk di wilayah Provinsi Banten yang menderita kelaparan. Penelitian Tri Bastuti Purwantini, dkk (2002) yang bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa ketersediaan pangan

yang cukup di suatu wilayah tidak menjamin adanya ketahanan pangan tingkat rumah tangga/individu yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan di tingkat regional status ketahanan pangan wilayah (Sulawesi Utara) tergolong tahan pangan terjamin, namun demikian masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan cukup tinggi. Proporsi rumah tangga rawan pangan di daerah pedesaan relatif lebih tinggi dari pada penduduk kota. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan di tingkat wilayah dengan status tahan pangan terjamin, tidak cukup menjamin tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi ketahanan pangan di Provinsi Banten berdasarkan perbandingan 2 metodologi yang digunakan?
2. Indikator ketahanan pangan apa yang paling mengancam /rentan di Provinsi Banten?

3. Wilayah Kota/Kabupaten mana yang paling rentan kondisi ketahanan pangannya?

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif komparatif berupa studi literature yang dilakukan di Provinsi Banten dengan membandingkan antara data pada peta FSVA (Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan) tahun 2018 mengenai sebaran ketahanan pangan di Provinsi Banten dengan penelitian yang dilakukan oleh Deby Iryani Setiawan, dkk (2017). Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai pola sebaran ketahanan pangan di Provinsi Banten dengan membandingkan analisis yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian berupa peta FSVA yang menggunakan 9 indikator dari 3 aspek ketahanan pangan, yaitu: : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap

total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan Angka harapan hidup pada saat lahir. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Deby Eryani Setiawan, dkk (2017) yang menggunakan 6 indikator, yaitu : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi beras, keluarga prasejahtera, akses listrik, gizi buruk, stunting, dan akses air.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Banten

Provinsi Banten terhitung kecil sebagai sebuah provinsi dibandingkan

dengan provinsi lain di Indonesia. Karakteristik wilayah Banten yang strategis terletak di pintu masuk Jawa dari arah Sumatera dan dekat dengan ibukota merupakan faktor yang mendukung perkembangan pengelolaan SDA. Hal ini terkait dengan distribusi hasil SDA yang bisa lebih cepat. Dengan demikian, Sumber Daya Alam yang tersedia wajib dijaga keberadaan dan kelestariannya selain untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Tabel 4 memperlihatkan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan di sejumlah provinsi di pulau Jawa. Provinsi Banten berada di posisi terakhir, hal ini salah satunya dikarenakan luas provinsi yang relatif kecil bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di pulau Jawa.

Tabel 4. Luas Panen, Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa (2018)

Provinsi	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)	Luas Panen (ha)
	2018	2018	2018
DKIJakarta	3990.00.00	57.83	690.00.00
Jawa Barat	9539330.00	56.39.00	1691725.00
Jawa Tengah	9512434.00	56.61	1680406.00
DI Yogyakarta	497599.00	54.07.00	92035.00
Jawa Timur	10537922.00	57.63	1828700.00
Banten	1603550.00	48.38.00	331444.00

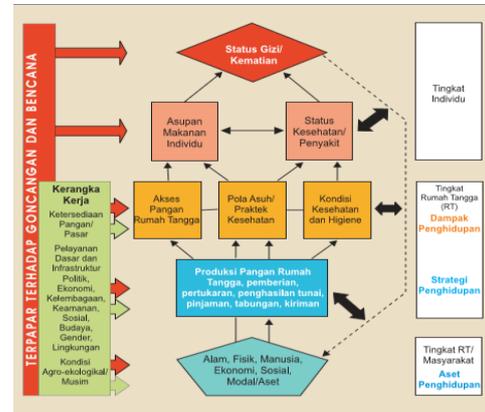
Sumber : BPS Provinsi Banten (2018)

Konsep Ketahanan Pangan Berdasarkan World Food Programme (WFP) pada Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Pada World Food Summit di tahun 1996 Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai “Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, social, ekonomi mempunyai akses pangan memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat”

Pemerintah Indonesia melalui dukungan World Food Programme (WFP) yang memiliki pengalaman di bidang analisis dan ketahanan pangan, maka pada tahun 2003 Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang diketuai oleh Presiden RI dengan sekretariat berada di Badan Ketahanan Pangan (BKP) membuat Peta Kerawanan Pangan (FIA) yang pertama di tahun 2005 lalu berubah nama menjadi peta FSVA jilid ke 2 di tahun 2009, analisis dan pemetaan dilakukan mengenai ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi yang digambarkan dalam Kerangka Konsep

Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 3).



Gambar 3.

Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

(Sumber : World Food Programme, 2009)

Indikator yang dipilih dalam FSVA ini berkaitan dengan tiga pilar ketahanan pangan berdasarkan konsepsi ketahanan pangan dan gizi, yaitu aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. FSVA dikembangkan dengan menggunakan 9 indikator kerawanan pangan kronis dan 4 indikator kerawanan pangan sementara/transien (WFP, 2009). Indikator yang disusun pada peta FSVA menurut WFP terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Indonesia

Aspek	Indikator
Ketersediaan Pangan (<i>Food Availability</i>)	1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar

Akses Pangan dan Penghidupan (<i>Food and Livelihood Access</i>)	2. Persentase penduduk Hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup pada saat Lahir 6. Berat badan balita di bawah standar 7. Perempuan buta huruf 8. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien	10. Bencana alam 11. Penyimpangan curah hujan 12. Persentase daerah puso 13. Deforestasi hutan

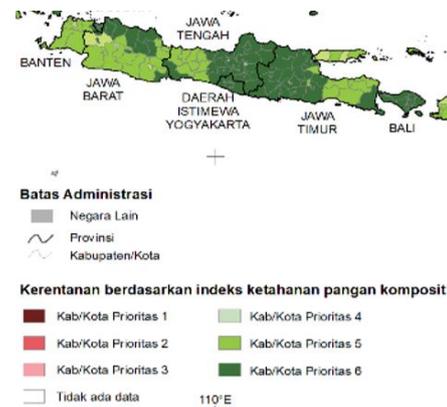
Sumber : WFP, 2009

Peta-peta dibuat dengan menggunakan pola warna yang seragam, yaitu gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah menunjukkan variasi tingkat kerawanan pangan dan gradasi hijau menggambarkan kondisi yang lebih baik. Warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dalam hal ketahanan atau kerawanan pangan.

***Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten**

Berdasarkan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2018 yang bersumber dari Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian, Provinsi Banten masuk dalam kategori prioritas 6 yang artinya wilayah Provinsi Banten masuk dalam kategori tahan pangan. FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil Analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan yang merupakan turunan dari tiga aspek katahanan pangan.

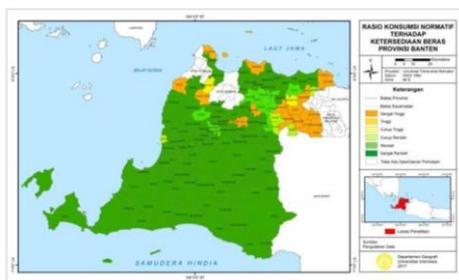


Gambar 4.
 Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Provinsi Banten
 (BKP Kementerian Pertanian, 2018)

Indikator Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Pangan Serealia Provinsi Banten

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Jika dilihat pada Gambar 4, rasio konsumsi

normative per kapita terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Banten terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : timur, barat dan utara. Bagian timur, yang meliputi wilayah berada pada kondisi surplus sedang, bagian barat surplus tinggi, sementara bagian utara termasuk kategori surplus rendah. Berdasarkan penelitian Deby Iryani Setiawan, dkk (2017) bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Banten telah mencapai surplus pangan dimana nilai NCPR rendah sampai sangat rendah. Pola sebarannya berdasarkan pada Gambar 4. Berdasarkan peta sebaran tersebut masih ada sebagian kecil daerah yang memiliki surplus rendah (daerah berwarna kuning dan oranye).



Gambar 5.
Peta Rasio Konsumsi Normatif terhadap Produksi Beras Provinsi Banten (Deby Iryani Setiawan, dkk, 2017)

Indikator Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Banten

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan Peta FSVA Provinsi Banten memiliki persentase < 10% (Level 6). Artinya kondisi tersebut dikatakan sangat baik karena semakin rendah angka persentase penduduk di bawah garis kemiskinan maka semakin meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Berdasarkan penelitian Deby Iryani Setiawan, dkk (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar Kecamatan di Provinsi Banten memiliki persentase rumah tangga miskin yang rendah, meskipun masih ada sebagian kecil wilayah yang masih memiliki persentase rumah tangga miskin yang cukup tinggi, yang ditunjukkan dengan warna kuning pada peta (Gambar 5).



Gambar 5.
Peta Persentase Rumah Tangga Miskin di Provinsi Banten (Deby Iryani Setiawan, dkk, 2017)

Sementara angka kemiskinan Provinsi Banten berdasarkan hasil

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2018 adalah sebesar 5,25 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,24 persen. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 668,74 ribu orang pada September 2018. Komoditas makanan yang memberikan pengaruh terbesar pada kenaikan garis kemiskinan baik di perkotaan dan perdesaan adalah beras dengan masing-masing kontribusi sebesar 19,63% dan 23,45% (Tabel).

Tabel 5. Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan

Komoditi (1)	Perkotaan (2)	Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan			
Beras	19,63	Beras	23,45
Rokok kretek filter	11,46	Rokok kretek filter	17,33
Telur ayam ras	4,19	Telur ayam ras	3,18
Daging ayam ras	3,86	Roti	2,70
Mie Instan	2,61	Kopi bubuk dan kopi instan	2,60
Non Makanan			
Perumahan	9,30	Perumahan	10,84
Bensin	5,15	Bensin	2,54
Listrik	3,71	Listrik	2,05
Pendidikan	1,77	Pendidikan	1,06
Perlengkapan mandi	1,21	Perlengkapan mandi	1,01

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (September, 2018)

Penelitian Irmadi Nahib (2013) menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak adalah kabupaten yang memiliki desa miskin terbanyak di

Provinsi Banten. Lebih dari 50% desa di Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori desa miskin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori kemiskinan "sedang" yaitu sejumlah 191 desa (63,25 %), dalam kategori kemiskinan "rendah" sejumlah 60 desa (19,87 %), dan dalam kategori kemiskinan "tinggi" sejumlah 51 desa (16,89%).

Indikator Proporsi Pengeluaran untuk Pangan terhadap Total Pengeluaran Provinsi Banten

Indikator proporsi pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran berdasarkan peta FSVA ada sebagian kecil wilayah di bagian utara Provinsi Banten yang berada pada persentase pengeluaran untuk pangan 30 - < 40% (Level 3), sementara wilayah lainnya antara 20 - < 30% (Level 4) 4). Artinya semakin tinggi persentase pengeluaran rumah tangga untuk pangan terhadap total pengeluarannya maka semakin rendah tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, atau dengan kata lain, semakin rendah level indikator

proporsi pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga maka semakin rendah tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut. Data pada BPS (2018) menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan terbesar adalah pada kelompok makanan dan minuman jadi yaitu Rp 152.388 dan kedua adalah pada kelompok padi-padian sebesar Rp 63.584 (Tabel 5).

Tabel 6. Pengeluaran Rata-rata Per kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Provinsi Banten (Rupiah)

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Per kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan (Rupiah)
Rokok	66736
Jumlah	483956
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	30140
Daging	24100
Telur dan susu	31258
Sayur-sayuran	28198
Kacang-kacangan	10630
Buah-buahan	26696
Minyak dan Kelapa	12361
Bahan minuman	14650
Bumbu-bumbuan	8923
Konsumsi lainnya	10844
Makanan dan minuman jadi	152388
Padi-padian	63584
Umbi-umbian	3449

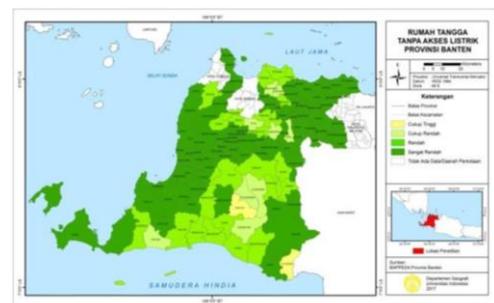
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2018)

Indikator Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Provinsi Banten

Indikator persentase rumah tangga tanpa akses listrik di Provinsi Banten berdasarkan peta FSVA sangat rendah atau < 10% (Level 6)

Artinya semakin rendah persentase rumah tangga tanpa akses listrik maka tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut semakin meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi level indikator persentase rumah tangga tanpa akses listrik maka semakin meningkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Persentase rumah tangga tanpa akses listrik di provinsi Banten menurut penelitian Deby Iryani dkk (2017) menunjukkan bahwa belum semua rumah tangga di Provinsi Banten menggunakan listrik yang ditunjukkan dengan warna kuning dan hijau muda pada peta (Gambar 6).



Gambar 6.

Peta Persentase Rumah Tangga tanpa Akses Listrik di Provinsi Banten (Deby Iryani Setiawan, dkk, 2017)

Indikator Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Provinsi Banten

Indikator rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun di

Provinsi Banten berdasarkan peta FSVA terbagi ke dalam 3 kategori yaitu : 7,5 - < 8,5 tahun di sebagian kecil wilayah bagian timur dan utara (Level 4), 6 – 6,5 tahun di sebagian timur dan selatan (Level 2), dan 6,5 – 7,5 tahun di sebagian besar wilayah barat dan sebagian wilayah selatan, dan sebagian kecil wilayah utara (Level 3). Artinya semakin rendah angkanya dan levelnya menunjukkan semakin rendah pula tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Berdasarkan peta FSVA sebagian besar wilayah Provinsi Banten jika dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun tergolong rentan.

Indikator Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Provinsi Banten

Indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih berdasarkan peta FSVA Provinsi Banten terbagi menjadi 2 kategori wilayah, dimana sebagian besar wilayah di bagian selatan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih adalah 60 - < 70% (Level 2), sementara di bagian utara sebagian

kecil wilayah terdapat 40 - < 50% rumah tangga tanpa akses ke air bersih (Level 4). Artinya semakin tinggi persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih dan semakin rendah levelnya maka semakin rendah tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih dan semakin tinggi levelnya maka semakin meningkat ketahanan pangan wilayah tersebut.



Gambar 8.
Peta Persentase Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih di Provinsi Banten (Deby Iryani Setiawan, dkk, 2017)

Indikator Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Provinsi Banten

Rata-rata satu orang tenaga kesehatan di Indonesia bekerja melayani wilayah seluas 2,84 km² dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 136 jiwa/km² (BKP, Kementerian Pertanian, 2018). Indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan di Provinsi Banten

adalah < 5 (Level 6). Artinya semakin rendah angkanya atau semakin tinggi levelnya maka semakin meningkat ketahanan pangan suatu wilayah, dan sebaliknya semakin tinggi angkanya atau rendah levelnya maka semakin rendah ketahanan pangan wilayahnya.

Indikator Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting) dan Status Gizi Balita Provinsi Banten

Indikator balita pendek (stunting) menunjukkan kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh merupakan salah satu indikator pada aspek pemanfaatan pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Indikator persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) untuk seluruh wilayah Provinsi Banten berdasarkan peta FSVA berada pada kategori tinggi (rawan) dimana persentasenya 30 - < 39% (Level 2). Artinya semakin tinggi persentase balita dengan tinggi di bawah standar maka semakin rendah levelnya menunjukkan ketahanan pangan suatu wilayah akan semakin rendah.

Penelitian Deby Iryani Setiawan dkk (2017) menunjukkan bahwa status gizi balita dengan jumlah balita mengalami stunting cukup tinggi yakni lebih dari 40% yang tersebar hampir semua di Kecamatan Provinsi Banten. Semakin banyak persentase balita yang mengalami stunting maka semakin rendah ketahanan pangan suatu wilayah yang ditunjukkan dengan warna kuning pada peta (Gambar 8).



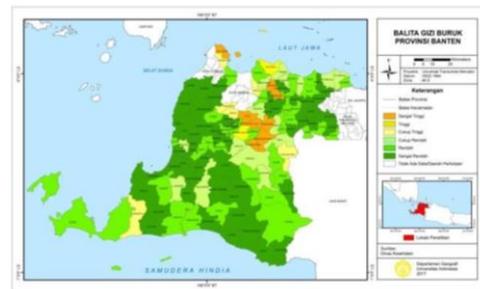
Gambar 8.
Peta Persentase Balita Stunting di Provinsi Banten
(Deby Iryani Setiawan, dkk, 2017)

Data yang berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2018 menunjukkan bahwa angka stunting di beberapa wilayah di Provinsi Banten termasuk tinggi dan masuk ke dalam wilayah prioritas (Kemenkes, 2018). Keadaan stunting merupakan salah satu indikator kerawanan pangan di suatu daerah. Berdasarkan data tersebut sebanyak 3,6% balita umur 0-23

bulan berada pada kondisi gizi buruk berdasar bobot badan/umur dan sebanyak 6,3% berada pada kondisi gizi kurang. Sedangkan berdasarkan tinggi badan/umur status gizi pada balita berumur 0-23 bulan di Provinsi Banten sebesar 8,1% berada pada kondisi sangat pendek dan 11,8% berada pada kondisi pendek. Sedangkan pada balita usia 0-59 bulan sebanyak 10,6-19,0% berada pada kondisi sangat pendek dan pendek. Sementara itu berdasar status gizi balita usia 0-59 bulan sebanyak 3,1-7,2% berada pada kondisi sangat kurus-kurus. Data Kementerian Kesehatan (2018) tersebut bahwa angka tertinggi di wilayah Provinsi Banten adalah di Kabupaten Pandeglang bahwa sebanyak 37,8% balita berada pada kondisi stunting dan masuk dalam karakteristik masalah gizi akut-kronis.

Provinsi Banten memiliki jumlah balita gizi buruk yang tergolong rendah yakni kurang dari 40% per kecamatan yang tersebar hampir di seluruh Provinsi Banten. Namun di beberapa Kecamatan di wilayah Provinsi Banten masih ada kasus balita dengan gizi buruk yang

ditunjukkan dengan warna oranye dan kuning pada peta (Gambar 9). Semakin rendah/sedikit persentase balita gizi buruk, maka semakin meningkatkan klasifikasi ketahanan pangan di daerah tersebut (Deby Iryani Setiawan dkk, 2017).



Gambar 9.

Peta Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Banten
(Deby IryaniSetiawan dkk, 2017)

Indikator Angka Harapan Hidup Provinsi Banten

Indikator angka harapan hidup berdasarkan peta FSVA di Provinsi Banten menunjukkan rata-rata usia yang tergolong tinggi yaitu >64 – 67 tahun (level 4) dan > 67 – 70 tahun (Level 5). Artinya, semakin tinggi angka harapan hidup penduduk suatu wilayah, maka semakin meningkatkan ketahanan pangan wilayah tersebut.

Food Security Index atau Indeks Ketahanan Pangan (IKP)Provinsi Banten

Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2018) setelah menentukan dan menganalisis sembilan indikator untuk menentukan Indeks Ketahanan Pangan Nasional metode selanjutnya adalah metode pembobotan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI (EIU 2016 dan 2017) dan GHI (IFPRI 2017).

Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten. Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

Berdasarkan data IKP yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2018) (Tabel

2) maka skor dan peringkat dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dapat digambarkan pada Tabel 5. Berdasarkan data IKP tersebut terlihat bahwa skor terendah dimiliki oleh Kota Serang dengan nilai IKP 59,16 yang masuk dalam kelompok 3 (rawan pangan kategori rendah). Sementara wilayah lainnya masuk ke dalam kelompok aman pangan kategori tinggi sampai sangat tinggi.

Tabel 7. Skor dan Peringkat Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Banten berdasarkan Perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Kabupaten/Kota	Skor	Peringkat
Kabupaten		
Serang	75.58	152
Lebak	71.63	238
Tangerang	71.10	250
Pandeglang	70.42	261
Kota		
Tangerang Selatan	83.33	12
Tangerang	76.84	35
Cilegon	68.72	60
Serang	59.16	85

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2018)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai nilai-nilai indikator dalam menghitung ketahanan pangan menurut peta FSVA dengan 9 indikator dan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Deby Iryani Setiawan dkk dengan melakukan pengolahan data spasial dan tabular yang kemudian

dilakukan klasifikasi wilayah ketahanan pangan berdasarkan metode skoring dan pembobotan dengan variable wilayah ketahanan pangan, topografi, aksesibilitas penghubung, dan lumbung pangan dan 6 indikator di Provinsi Banten dapat dilihat bahwa indicator yang memiliki urutan kerentanan tertinggi sampai terendah adalah :

1. Persentase balita stunting baik menurut peta FSVA maupun penelitian oleh Deby Iryani Setiawan dkk dengan melakukan pengolahan data spasial dan tabular yang kemudian dilakukan klasifikasi wilayah ketahanan pangan berdasarkan metode skoring dan pembobotan dengan variable wilayah ketahanan pangan, topografi, aksesibilitas penghubung, dan lumbung pangan. Kedua data menunjukkan bahwa angka stunting masih tinggi di hamper seluruh wilayah Provinsi Banten. Peta FSVA menunjukkan angka 30-39% sementara penelitian Deby Iryani Setiawan dkk menunjukkan angka $> 40\%$.
2. Persentase balita gizi buruk, dimana menurut penelitian Deby Iryani Setiawan dkk menunjukkan angka $\leq 40\%$.
3. Indikator rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun di Provinsi Banten berdasarkan peta FSVA terbagi ke dalam 3 kategori yaitu : Level 2 (6 – 6,5 tahun), Level 3 (6,5 – 7,5 tahun) dan level 4 (7,5 – 8,5 tahun).
4. Indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih dimana sebagian besar berdasarkan peta FSVA Provinsi Banten memiliki persentase rumah tangga tanpa akses air bersih adalah 60 - $< 70\%$ (Level 2) dan Level 4 (40 - $< 50\%$).
5. Indikator proporsi pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran. Berdasarkan peta FSVA Provinsi Banten berada pada Level 3 (30 - $< 40\%$) dan Level 4 (20 - $< 30\%$).
6. Indikator angka harapan hidup berdasarkan peta FSVA di Provinsi Banten menunjukkan

rata-rata usia yang tergolong cukup tinggi yaitu >64 – 67 tahun (level 4) dan > 67 – 70 tahun (Level 5)

7. Indikator persentase rumah tangga tanpa akses listrik di Provinsi Banten berdasarkan peta FSVA sangat rendah atau < 10% (Level 6). akan tetapi berdasarkan penelitian Deby Iryani Setiawan dkk (2017) masih ada sebagian wilayah yang memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik yang cukup tinggi, terutama di bagian selatan dan sedikit di wilayah utara.
8. Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, Berdasarkan Peta FSVA Provinsi Banten memiliki persentase < 10% (Level 6), akan tetapi berdasarkan penelitian Deby Iryani Setiawan dkk (2017) masih ada beberapa wilayah yang memiliki penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang cukup tinggi.
9. Indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan

di Provinsi Banten adalah berdasarkan pada peta FSVA adalah sangat baik dengan nilai < 5 (Level 6).

Berdasarkan nilai *Food Security Indeks* masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menunjukkan bahwa Kota Serang memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten dan berada pada kelompok wilayah tahan pangan kategori rendah.

Berdasarkan peta FSVA Provinsi Banten tahun 2018 indikator yang digunakan untuk menghitung ketahanan pangan berupa 9 indikator yang didasarkan pada 3 aspek ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Sementara penelitian Deby Iryani Setiawan dkk (2017) tentang Pola Sebaran Ketahanan Pangan di Provinsi Banten hanya menggunakan 6 indikator, yaitu : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi beras, rumah tangga miskin, akses terhadap listrik, balita gizi buruk, balita stunting, dan akses terhadap air bersih. Padahal

menurut United Nations World Food Programme (UN WFP) terdapat 13 indikator dalam menyusun peta FSVA, dimana terdapat aspek kerentanan terhadap kerawanan pangan transien dengan 4 indikator, yaitu : bencana alam, penyimpangan curah hujan, persentase daerah puso, dan deforestasi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2019. Diunduh dari www.bps.go.id pada tanggal 20 Desember 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018.
- Christopher B. Barrett. 2002. *Food Security and Food Assistance Programme*. Department of Applied Economics and Management. Cornell University. Ithaca. New York.
- Deby Eryani Setiawan, M.H. Dewi Susilowati, Hafid Setiadi. 2017. Pola Sebaran Wilayah Ketahanan Pangan di Provinsi Banten. Industrial Research Workshop and National Seminar. Politeknik Negeri Bandung.
- Handewi P.S. Rachman, Mewa Ariani, dan T.B. Purwantini. 2002. Distribusi Provinsi di Indonesia menurut Derajat Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Indeks Ketahanan Pangan Indonesia. 2018: Versi Rangkuman. Badan Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Irmadi Nahib. 2013. Analisis Spasial Sebaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, Volume 19 No.2 Hal.113 – 119.
- Nurhayati. 2011. Strategi Pembangunan Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Baik Di Tingkat Regional dan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (*A Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia*). 2009. Dewan Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian Republik Indonesia. World Food Programme.
- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia. 2018: Versi Rangkuman. Badan Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Tri Bastuti Purwantini, Handewi P.S. Rachman dan Yuni Mari. 2002. Analisis Ketahanan Pangan Regional Dan Tingkat Rumah Tangga (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Bogor.